

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025- 2029**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjen D.I Panjaitan No.12 telp
(0536) 3221582 Fax 32224185
Palangka Raya 73112

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kalimantan Tengah	8
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kalimantan Tengah	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kalimantan Tengah	16
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis	21
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	24
 BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG URUSAN	
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	36
 BAB V PENUTUP	104

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kalimantan Tengah	8
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kalimantan Tengah	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kalimantan Tengah	16
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	24
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG URUSAN	
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	36
BAB V PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	11
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	12
Tabel 2.4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	13
Tabel 2.5	Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	13
Tabel 2.6	Sasaran dan Prasarana Pelayanan Sosial	14
Tabel 2.7	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2024	14
Tabel 2.8	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021-2024	15
Tabel 2.9	Data Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2024	17
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi PD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	20
Tabel 2.11	Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	23
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	30
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	31
Tabel 3.3	Penerapan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	33
Tabel 3.4	Perumusan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	33
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	43
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	39
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	101
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	103
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	10
------------	---	----

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Kementerian Sosial dalam rangka mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum, Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

Demikian Rencana Strategis ini ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Agustus 2025

KEPALA DINAS,



EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770207 200312 1 004

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Gubernur terpilih. Penyusunan Renstra Dinsos disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Sosial.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara sosial ekonomi dan sosial budaya turut berperan penting dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih lanjut dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga negara berkewajiban untuk

menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Dinas Sosial berupaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kalimantan Tengah menuju kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Manajemen yang berorientasi pada hasil diperlukan perencanaan strategis oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029, meskipun di dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dan perkembangan permasalahan sosial yang makin kompleks.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, hambatan, dan perubahan serta permasalahan sosial yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi fakir miskin, meningkatnya jumlah fakir miskin, permasalahan lanjut usia yang cenderung meningkat akibat kemiskinan, terbatasnya akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, munculnya tuna sosial (gepeng dan pengemis), maraknya terjadinya tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak serta berbagai permasalahan sosial lainnya yang memerlukan penanganan dan perhatian dari pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan pada peraturan, perundangan antara lain:

1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 dan 34.
2. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2028 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025– 2045.
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

29. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/89/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Penjabaran dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Tengah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai instrumen pemantauan, pengendalian dan evaluasi capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun ke depan;
- c. Memberikan arahan tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembangunan daerah selama waktu 5 tahun sebagai upaya mendukung visi misi kepala daerah terpilih;
- d. Pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran, Permasalahan Serta Isu Strategis

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; berisi Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat

Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun kedepan serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan bidang sosial.

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan bidang sosial sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan korban bencana alam dan sosial.

sedangkan fungsi Dinas Sosial Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan korban bencana alam dan sosial; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi dinas sosial.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat;

- a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Rehabilitasi Sosial

4) Bidang Pemberdayaan Sosial

UPTD; terdiri dari 4 (empat) panti yaitu:

1. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Majar Tabela"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Advokasi Sosial Bina Remaja
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial Bina Remaja
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sinta Rangkang"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Advokasi Sosial Tresna Werdha
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial Tresna Werdha
- e. Jabatan Fungsional

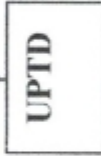
3. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) "Pambelum"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Advokasi Sosial Bina Laras
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial Bina Laras
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Ruhuy Rahayu"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Advokasi Sosial Karya Wanita
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial Karya Wanita
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

1) Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun sebanyak 140 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 91 orang dan pegawai PPPK 15 orang dan 34 orang pegawai kontrak, untuk melihat kompetensi yang dimiliki, diklasifikasikan kedalam jenjang pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar	1 orang	
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 orang	
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20 orang	
4	Diploma Tiga (D-3)	8 orang	
5	Diploma Empat (D-4)	6 orang	
6	Sarjana (S-1)	34 orang	
7	Sarjana (S-2)	20 orang	
9	PPPK	15 orang	
10	Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak	34 Orang	
	Jumlah	140 orang	

Dari jumlah pegawai sebanyak 91 orang, berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	II/a Pengatur Muda	0	1	1	
2	II/b Pengatur Muda Tk. I	1	0	1	
3	II/c Pengatur	1	2	3	

4	II/d	Pengatur Tk. I	1	0	1	
5	III/a	Penata Muda	10	9	19	
6	III/b	Penata Muda Tk.I	11	10	20	
7	III/c	Penata	2	7	9	
8	III/d	Penata Tk. I	11	10	21	
9	IV/a	Pembina	2	5	7	
10	IV/b	Pembina Tk. I	2	5	7	
11	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1	
		Jumlah	42	49	91	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	0	0
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	3	5	8
4	Fungsional Tertentu	17	22	39
4	Fungsional Umum	19	19	38
	Jumlah	42	49	91

2) Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	136	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	677	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	632	Orang
4	Penyuluh Sosial Masyarakat	25	Orang
5	Pelopop Perdamaian	80	Orang
6	SDM Program Keluarga Harapan(PKH)	224	Orang
7	Pendamping Sosial	24	Orang
	JUMLAH	1.796	Orang

b. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana tabel 2.5

Tabel 2.5
Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Nama Kelembagaan	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial	98	Lembaga
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	14	Lembaga
3	Karang Taruna	803	Lembaga
4	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	63	Lembaga
	Jumlah	977	Lembaga

3) **Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung kelancaran pelayanan sosial bagi penyanadang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial provinsi Kalimantan Tengah memiliki sarana dan prasarana pelayanan sosial, adapun jenis sarana dan prasarana sosial dapat dilihat dalam tabel 2.6

Tabel 2.6
Sasaran dan prasarana pelayanan sosial

No	Jenis Saprass	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Dinas	1 Buah	
2	Panti Sosial Lanjut Usia	1 Buah	Daya tampung 80 orang
3	Panti Sosial Karya Wanita	1 Buah	Daya tampung 40 orang
4	Panti Sosial Bina Remaja	1 Buah	Daya tampung 100 orang
5	Trauma Center	1 Buah	Daya tampung 10 orang
6	Gudang Bencana	1 Buah	
7	Panti Sosial Bina Laras	1 Buah	Daya tampung 40 orang

1. Sumber Dana / Penganggaran

Sumber dana atau penganggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi APBD Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2024

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	% Fisik
2021	30.441.597.716	27.387.470.874,76	91,45	100
2022	57.831.019.864	54.697.001.601	94,57	100
2023	113.297.581.535	27.084.725.604	23,91	100
2024	108.413.700.926	100.148.279.463	92,38	100
Total	309.983.900.041	209.317.477.542,76	67,26	100

Data realisasi pada akhir bulan Desember

Pada Tahun 2023 anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tidak terserap secara sempurna dikarenakan adanya bantuan social melalui dana DBH -DR tidak tersalurkan sebesar Rp 80.000.000.000 yang ditujukan untuk 100.000 KPM, disebabkan karena terjadinya kesalahan administrasi.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 2(Dua) indikator kinerja sasaran pada Renstra 2021-2026 rata-rata mencapai target yang telah ditentukan. Namun, masih terdapat capaian kinerja beberapa indikator yang dirasa belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis: Meningkatnya Penanganan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator "Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah melalui Dinas Sosial telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial khususnya bagi PPKS yang memerlukan pelayanan di dalam panti. Berikut jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.8

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2021-2024

No	Jenis PPKS	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			
		2021	2022	2023	2024
1	Korban bencana alam	41.432	-	110712 orang	204.785 Jiwa
2	Korban bencana sosial	169 kk	402 KK	1612 Orang	196 KK
3	Gepeng (gembel dan pengemis)	-	-	3 orang	10 orang
4	Penderita HIV/AIDS	131 orang	4 Orang	4 orang	4 orang
5	Fakir Miskin	14.009	-	100.000 KPM	145.630 Orang/ Jiwa
6	Anak terlantar	3044 orang	2.970 orang	2.143 orang	3.254 Orang
7	Anak korban kekerasan lingkungan rumah tangga			2 orang	2 Orang
8	Anak korban kekerasan lingkungan masyarakat			-	1 Orang

9	Anak korban kekerasan seksual	10 orang	39 orang	38 orang	42 Orang
10	Anak korban pelecehan seksual	10 orang	3 orang	3 orang	10 Orang
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus			4 orang	-
12	Lanjut usia terlantar	628	45 orang	51 orang	59 Orang
14	Penyandang disabilitas	3025 orang	4204 orang	2.149 orang	2.802 Orang
15	Korban trafficking	3	-	-	4 Orang
16	Korban tindak kekerasan	31 orang	10 orang	15 orang	16 Orang
17	Kelompok minoritas	22	-	-	-
18	Perempuan rawan sosial ekonomi	20	20 orang	10 orang	40 Orang
19	Tuna susila	-	-	-	-
20	Penanganan orang terlantar	84 orang	79 orang	113 orang	96 Orang
21	Balita Terlantar	1 orang	3 orang	1 orang	1 orang
23	Korban Penyalahgunaan NAPZA	69 Orang	Kewangan Berada di Pusat	Kewangan Berada di Pusat	Kewangan Berada di Pusat
24	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	12 orang	10 orang	9 orang	2 orang
25	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	7 orang	4 orang	3 orang	6 orang

Data jumlah PPKS dari tahun ke tahun menunjukkan tren fluktuatif di berbagai kategori, yang merupakan indikator peningkatan efektivitas program kesejahteraan sosial. Penurunan jumlah PPKS ini menggambarkan keberhasilan program sosial dalam mengurangi kerentanan masyarakat di berbagai sektor. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan angka-angka tersebut terus menurun dan tidak mengalami peningkatan di tahun tahun mendatang.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2021-2024 juga menyalurkan bantuan social untuk Masyarakat miskin yang bersumber dari Dana APBN dan dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk meningkat taraf hidup Masyarakat yang kurang mampu menjadi layak. Adapun bantuan sosia yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Adalah sebagai berikut

NO	JENIS BANTUAN	SASARAN	TAHUN				SUMBER DANA	KETERANGAN
			2021	2022	2023	2024		
1	PKH	Masyarakat Miskin	54.302	57.271	57.033	67.174	APBN	
2	SEMPAKO/BPNT	Masyarakat Miskin	86.522	93.091	80.597	76.661	APBN	
3	Banmas Alat Bantu Disabilitas / Kursi Roda	Penyandang Disabilitas	n/a	n/a	18 kaki palsu	n/a	APBN	
4	Permakanan Lansia	LANSIA	n/a	45	45	45	APBN	
5	Bantuan permakanan untuk anak terlantar di dalam panti	Anak di Dalam Panti Asuhan	2102	1225	1040	555	APBD	
6	Yapi	Anak Yatim/Piatu	116	528	1.241	1.059	APBN	

Disamping itu, berdasarkan data capaian SPM urusan social di Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan berikut juga menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam hal rehabilitasi sosial dasar untuk kelompok rentan di dalam panti dari tahun 2021-2024. Seluruh indikator menunjukkan keberhasilan peningkatan dari Tahun ke Tahun. Baik individu maupun kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di dalam panti mendapatkan program rehabilitasi sosial secara menyeluruh.

Tabel 2.9 Data Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100	100	100	100	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi	100	100	100	100	

		sosial dasar anak terlantar di dalam panti					
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	100	81,25	100	100	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut tuna sosial di dalam panti	-	-	100	100	
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap darurat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial diperbaiki secara optimal. Pada kelompok anak terlantar, secara khusus tercatat sebanyak 4.953 orang yang menerima layanan penuh termasuk fasilitas pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan

reunifikasi keluarga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, korban bencana alam dan sosial juga tertangani dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan pada beberapa layanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki panti khususnya gelandangan dan pengemis.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial ini didukung oleh Program-program antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Pencapaian kinerja pelayanan yang dimaksud didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kalimantan Tengah dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2020-2024 memiliki trend positif dan meningkat setiap tahunnya meskipun pada Tahun 2023 tidak terserap dengan maksimal dikarenakan adanya anggaran untuk Blt yang tidak terserap dengan baik. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kalimantan Tengah

Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Pendapatan	57.250.000	60.000.000	60.000.000	40.000.000	50.400.000	45.100.000	46.200.000	44.800.000	88,03	75,17	77,00	112,00		
BELANJA DAERAH	30.441.597.716	57.831.019.864	113.257.581.535	108.413.700.926	27.837.470.847,76	52.056.307.092,36	27.084.725.604	89.609.894.463	91,45	90,01	23,91	82,66		
BELANJA OPERASI	25.853.326.716	54.184.861.797	106.604.412.432	104.242.501.613	23.357.954.317	48.465.851.193,36	23.173.903.187	85.549.492.043	90,35	89,45	21,74	82,07		
BELANJA MODAL	4.588.271.000	3.646.158.067	6.693.169.103	4.171.199.313	4.479.516.530,76	3.590.455.899	3.910.822.417	4.060.392.420	97,63	90,47	58,43	97,34		

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kalimantan Tengah menunjukkan kecenderungan positif dan meningkatnya realisasi setiap tahunnya kecuali pada Tahun 2023 realisasi mengalami penurunan capaian realisasi dikarenakan tidak terserapnya anggaran dikarenakan tidak tersalurkannya bantuan langsung tunai yang berasal dari dana DBH-DR sebesar Rp. 80.000.000.000. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan anggaran yang positif pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan anggaran tersebut ditujukan untuk pemulihan sosial dan ekonomi di Masyarakat di Kalimantan Tengah yang terdampak dari covid 19 serta pemberian bantuan sosial.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak negatif permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena Dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang.

Perumusan Permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat dan penerima bantuan sosial. Meskipun upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya pemberian bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran.
2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan masyarakat yang ikut berperan serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang terjadi.
3. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan SDM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan respon dalam penyelesaian kasus-kasus sosial yang terjadi.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.11
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial	Permasalahan Dinas Sosial	Isu KLHS Relevan dengan Dinas Sosial	Isu Lingkungan Dinas yang Relevan dengan Sosial			Isu Strategis Dinas Sosial
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penanganan keluarga fakir miskin	Data DTKS belum valid	Masih banyak yang belum tepat sasaran	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	Isu kemiskinan masih menjadi program prioritas melalui berbagai macam program PKH, BOS dan JKN	Masih tingginya disparitas antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah	DTKS belum menggambarkan jumlah PPKS sesungguhnya
Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rawan kolusi dan nepotisme dalam pengusulan DTKS	Masih banyak yang belum tepat sasaran		Kenaikan angka inflasi nasional yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan	Masih tingginya kemiskinan di Kalimantan Tengah terutama di perkotaan yang berimplikasi pada berkembangnya PMKS jalanan.	PPKS belum tertangani dengan baik

Bab 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2025 – 2029 adalah:

"MENGANGKAT HARKAT MARTABAT MASYARAKAT DAYAK KHUSUSNYA, UMUMNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (MANGGATANG UTUS), DENGAN SPIRIT KEARIFAN LOKAL DAN BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG BERKAH, KALTENG MAJU, KALTENG BERMARTABAT UNTUK MENYAMBUT INDONESIA EMAS 2045. "

Sedangkan Misi RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.
2. Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.
5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Berdasarkan ke lima misi tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan misi ke-5 yaitu **Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045**. Kemudian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan berdasarkan misi yang diampu pada tujuan ke 8 yaitu **Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial** sedangkan sasaran yang menjadi sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah **Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif**.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka di an indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial											
- Memperluas jangkauan pendukung sosial adaptif	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0	57.22	57.25	57.30	57.45	57.50	57.75	
		Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100						
			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	100							
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun mendatang. Berikut langkah-langkah perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Visi :			
MENGANGKAT HARKAT MARTABAT MASYARAKAT DAYAK KHUSUSNYA, UMUMNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (MANGGATANG UTUS), DENGAN SPIRIT KEARIFAN LOKAL DAN BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBINDONESIA MENUJU KALTENG BERKAH, KALTENG MAJU, KALTENG BERMARTABAT UNTUK MENYAMBUT INDONESIA EMAS 2045			
Misi 5 : Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya	a. Melakukan pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	1. Melakukan verifikasi dan validasi Data calon penerima bantuan sosial
			2. Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat
			3. Melakukan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam panti, Terlantar, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti, Rehabilitasi

			Sosial Lanjut Terantar Dalam, serta Rehabilitasi Sosial Tuna Khusunya Gelandangan Pengemis dalam Sosial Dasar Usia di Panti, Sosial Dasar Sosial
		Melakukan perlindungan sosial bagi korban bencana	Melakukan penyaluran bantuan sosial dan dukungan psikososial untuk korban bencana alam dan sosial yang menjadi kewenangan Provinsi
	Meningkatnya peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Memberikan pelatihan pengembangan kapasitas PSKS

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Penahapan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Basis Data Sosial melalui pemutakhiran DTKS dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial tepat sasaran	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Penguatan PSKS dan kelembagaan sosial	Integrasi layanan sosial melalui pengembangan sistem informasi layanan sosial berbasis digital	Penguatan dan peningkatan kerjasama dengan CSR yang bergerak dalam bidang sosial dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk UMKM binaan

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Sosial selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	2	3	4	5
1	perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Melakukan verifikasi dan validasi Data calon penerima bantuan sosial	

	dan sosial	untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.		
2	pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	Melakukan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam panti, Terlantar, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, serta Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di dalam Panti Sosial serta Melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana yang menjadi Kewenangan penerapan SPM Sosial di Provinsi	
3		Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.	Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	
4	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan	Memberikan pelatihan pengembangan Kapasitas PSKS	

		pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial		
--	--	---	--	--

Bab PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

- 1) Program perlindungan dan jaminan sosial meliputi :
 - a. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal dengan sub kegiatan adalah
 - Pengangkatan Anak antar WNI
 - b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan adalah :
 - Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
 - Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial
 - Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai
- 2) Program Penanganan Bencana dengan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

- Pelayanan Dukungan Sosial
- Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
- Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
- Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
- Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial
- Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam

3) Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial Dasar terdiri dari 5 Kegiatan yaitu

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Dalam Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
- e. Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti

Sedangkan untuk rincian untuk masing-masing sub kegiatan pada masing-masing Program adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti sub kegiatannya terdiri dari
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari

- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas
- Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Dalam Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Dalam Panti terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut

- Pengasuhan
- Penyediaan makanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
- Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
- Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi anak terlantar di dalam panti
- Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti

- Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan asrama yang mudah diakses
- Penyediaan alat bantu
- Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi lanjut usia terlantar
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- Pemulasaran
- Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti sub kegiatannya terdiri dari

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

- Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan terdiri dari sub kegiatan berikut

- Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini

- Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
- Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah

4. Program Pemberdayaan sosial meliputi 2 kegiatan yaitu :

- a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah
- b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi

Sedangkan untuk rincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut

- a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah
 - Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang
- b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
 - Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
 - Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemulangan ke Daerah Asal
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- e. Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama /wisma yang mudah diakses
 - Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemulangan ke daerah asal
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial							
Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian Sosialnya			Indeks Kesejahteraan Sosial		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti		
					Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya layanan penanganan warga migran korban tindak kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1.06.03.1.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1.06.03.1.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase penyandang disabilitas terlintar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlintar	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlintar di dalam Panti	

Memperluas cakupan perlindungan sosial adaptif	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan keberfungsian sosialnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Pant	

			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Pemukiman	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya	1.06.04.1.01.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	

			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.01.0017 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	

			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Pemakanan	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	

				Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0021 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0022 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
				Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	

				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di dalam Pant
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Tertantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di dalam Pant
				Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di dalam Pant
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di dalam Pant
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di dalam Pant
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Pemakanan
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Akses
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Sosial
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan

				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0015 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terantar	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terantar di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terantar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.03.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terantar	
			Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	

			Jumlah Orang yang Menerima Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Pemukiman	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	

				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlar di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0013 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.04.0015 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Persentase PMKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pertekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	

				Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0001 - Penyediaan Pemakanan	

				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0002 - Penyediaan Sandang	
				Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0008 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	1.06.04.1.05.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
				Jumlah Orang yang Membantu Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0013 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.04.1.05.0014 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1.06.04.1.05.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	1.06.04.1.05.0017 - Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	
	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial		Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan data fakir miskin	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
		Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan penerima perlindungan sosial yang terdampak dari kemiskinan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.06.05.1.02.0003 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	

			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1.06.05.1.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	1.06.05.1.02.0009 - Fasilitas pendampingan potensi pengembangan Program Bantuan Sosial	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1.06.05.1.02.0010 - Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Perumahan	
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
				Persentase masyarakat rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan	1.06.06.1.01.0015 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.1.01.0018 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	1.06.06.1.01.0019 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	1.06.06.1.01.0020 - Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1.06.06.1.01.0022 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	

					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1.06.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1.06.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			

Persetase Program Administrasi Keuangan Yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		1.06.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	persentase program administrasi barang milik daerah pada Dinas Sosial yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

Persentase program administrasi kepegawaian yang terlaksana					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.06.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.06.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.06.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Persentase program administrasi umum yang terlaksana					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disedakan	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.06.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.06.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.06.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.06.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

Pembelian barang milik pemerintah daerah pada Dinas Sosial yang terakumulasi					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.06.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.06.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.06.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.06.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penderita Pelayaran Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

				Persepsi Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Persepsi program PUB dan UGB lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang terfiksasi Persepsi SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.1.01 - Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.06.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi 1.06.02.1.02.0010 - Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan 1.06.02.1.02.0013 - Koordinasi Pengumpulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi 1.06.02.1.02.0017 - Pengumpulan Gelar Pahlawan Nasional	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional		

Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam penanganan sosial				Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
				Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kementrian Masyarakatan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	1.06.02.1.02.0012 - Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.1.02.0014 - Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1.06.02.1.02.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	
				Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program	1.06.02.1.02.0016 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota	
Persentase TMP yang dikelola dengan baik	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan			Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0004 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
				Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0005 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0004 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0005 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			57.272.087.269,00		58.042.080.370,61		61.407.854.357,27		64.066.111.811,06		67.149.985.221,16			
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			34.302.800.382,00		34.764.068.803,56		36.180.870.366,41		37.772.603.970,34		38.619.805.580,16			
Meningkatnya kinerja program penunjang urusan daerah pada Dinas Sosial	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85	88,75	34.302.800.382,00	89	34.764.068.803,56	88,5	36.180.870.366,41	89,75	37.772.603.970,34	90	38.619.805.580,16	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		279.000.000,00		279.000.000,00		
Peningkatan pelaksanaan program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	285.000.000,00	5	275.000.000,00	5	275.000.000,00	5	279.000.000,00	5	279.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelurusan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		5	4			5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencstra PD dan Rencja PD yang disusun		0	0			2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	4			5		5		5			
1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	27.500.000,00	5	27.500.000,00		
1.06.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyelurusan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		

Terselenggaranya Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	5	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	16.500.000,00	5	18.000.000,00	5	18.000.000,00
1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00
Terdapatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	225.000.000,00	6	225.000.000,00	5	225.000.000,00	5	225.000.000,00	5	225.000.000,00	5	225.000.000,00
1.06.01.1.01.0011 - Penyelesaian Dokumen Perencanaan Urutan Saluran Runtas PD dan Runtas PD			-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Urutan Saluran Runtas PD dan Runtas PD yang Sisi	0	0	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00
1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.822.400.392,00		20.822.400.392,00		20.822.400.392,00		20.822.400.392,00		20.822.400.392,00		20.822.400.392,00
Pembayaran Program Administrasi Keuangan Yang Terdaftar													
1.06.01.1.02.0001 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	92	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00
Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	92	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00	147	20.371.760.392,00
1.06.01.1.02.0002 - Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			450.640.000,00		450.640.000,00		450.640.000,00		450.640.000,00		450.640.000,00		450.640.000,00
Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	450.640.000,00	1	450.640.000,00	1	450.640.000,00	1	450.640.000,00	1	450.640.000,00	1	450.640.000,00
1.06.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00
Terselesaikan program administrasi barang milik daerah pada Dinas Sosial yang terdapatnya	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00
1.06.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00
Terselesaikan program administrasi barang milik daerah pada Dinas Sosial yang terdapatnya	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00
1.06.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00
Terselesaikan program administrasi barang milik daerah pada Dinas Sosial yang terdapatnya	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Pencapaian RMD Kesejahteraan Sosial yang Mengukur Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Jumlah Penyuluh Sosial Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial, Karyawan yang Menerima Kapsulnya		30	60	790.000.000,00	60	912.585.532,76	60	991.974.425,51	60	1.019.330.326,83	60	1.110.402.724,38	
	Jumlah Orang yang Diadukan sebagai Calon Penerima Manfaat		0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Warga Masyarakat yang Penerima Manfaat, Pekerja Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Janda Duda Penderita Kanker yang menerima pengobatan dan santunan sosial		0	10		20		15		10		8		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diadukan Mendapat Sertifikat		15	30		30		30		30		30		
1.06.02.1.02.0005 - Peningkatan Kemampuan Pokok Sumber Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial					500.000.000,00		530.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		760.000.000,00	
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial, Karyawan yang Menerima Kapsulnya		30	60	500.000.000,00	60	530.000.000,00	60	680.000.000,00	60	680.000.000,00	60	760.000.000,00	
					250.000.000,00				271.974.425,51		248.930.285,83		-	
	Jumlah Warga Masyarakat Penderita, Pekerja Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Janda Duda Penderita Kanker yang menerima pengobatan dan santunan sosial		0	10	200.000.000,00	20	332.585.532,76	15	271.974.425,51	10	248.930.285,83	0	-	
1.06.02.1.02.0013 - Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi					60.000.000,00		60.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		300.402.724,38	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diadukan Mendapat Sertifikat		15	30	60.000.000,00	30	60.000.000,00	30	90.000.000,00	30	120.000.000,00	50	300.402.724,38	
					30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		56.000.000,00	
	Jumlah Orang yang Diadukan sebagai Calon Penerima Manfaat		0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	56.000.000,00	
1.06.02.1.02.0017 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial					200.000.000,00		200.000.000,00		210.948.336,37		220.328.787,12		231.060.324,33	
	Jumlah Warga Masyarakat yang Penerima Manfaat, Pekerja Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Janda Duda Penderita Kanker yang menerima pengobatan dan santunan sosial		100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	210.948.336,37	100	220.328.787,12	100	231.060.324,33	
1.06.02.1.02.0018 - Peningkatan Kemampuan Pokok Sumber Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial, Karyawan yang Menerima Kapsulnya		30	60	1.000.000.000,00	60	1.000.000.000,00	60	1.000.000.000,00	60	1.000.000.000,00	60	1.000.000.000,00	
					500.000.000,00		530.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		760.000.000,00	
	Jumlah Warga Masyarakat Penderita, Pekerja Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Janda Duda Penderita Kanker yang menerima pengobatan dan santunan sosial		0	10	200.000.000,00	20	332.585.532,76	15	271.974.425,51	10	248.930.285,83	0	-	

1.06.03.1.01 - Penyalangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Kekerasan di Daerah Provinsi Utara, Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipindahkan dari Tindak Kekerasan di Daerah Provinsi untuk Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota	202.688.789,64	210.840.336,37	220.228.797,12	231.000.324,33	
Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipindahkan ke daerah asal	100	150	150	150	170	
1.06.03.1.01.0002 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Tindak Kekerasan di Daerah Provinsi untuk Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota		200.000.000,00	210.840.336,37	220.228.797,12	231.000.324,33	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8.720.850.000,00	8.698.287.850,44	10.802.965.131,22	10.573.025.892,19	1.26.0.00.0.00.01.0000 - Dana Sosial
Montirannya layanan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	
1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terampil di dalam Panti		2.475.000.000,00	2.765.000.000,00	2.793.000.000,00	2.954.505.892,19	
Persentase penyandang disabilitas terampil yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	
Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kemerdekaan Provinsi 40	100	100	100	100	100	
Jumlah Bantuan Bagi Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terampil	1	14	14	14	14	
Jumlah Kabupaten Kota yang memperoleh dan Diimplementasikan Sistem Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dimana sesuai dengan Kemerdekaan	0	0	1	1	1	
Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Kemerdekaan Provinsi	0	0	0	5	5	
Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penyaluran Kelangka Kemerdekaan Provinsi	4	20	20	20	20	
Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Kelangka Kemerdekaan Provinsi	6	20	20	25	25	

Terdapatnya Pengumpulan Keunggulan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengalihan Keunggulan Provinsi	55	80	150.000.000,00	80	210.000.000,00	70	260.000.000,00	70	200.000.000,00	70	250.000.000,00
1.06.04.1.02.0001 - Penyediaan Samping				180.000.000,00		210.000.000,00		250.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00
Terdapatnya Pakaian dan Kebutuhan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Keunggulan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kebutuhan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Keunggulan Provinsi	55	60	180.000.000,00	70	210.000.000,00	70	225.000.000,00	70	225.000.000,00	70	225.000.000,00
1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Akses				85.250.000,00		130.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00
Orang yang Terlewat Asrama Layak Hari Keunggulan Provinsi	Jumlah Orang yang Terlewat Asrama Layak Hari Keunggulan Provinsi	55	80	85.250.000,00	80	100.000.000,00	70	125.000.000,00	70	125.000.000,00	70	125.000.000,00
1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbaikan Kebutuhan di dalam Padi				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.500.000,00
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbaikan Kebutuhan di dalam Padi Keunggulan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbaikan Kebutuhan di dalam Padi Keunggulan Provinsi	55	80	25.000.000,00	80	27.500.000,00	70	30.000.000,00	70	33.000.000,00	70	36.500.000,00
1.06.04.1.02.0006 - Pembelian Beribeg Padi, Meral, Spital dan Sosial				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.500.000,00
Terdapatnya Pembelian Beribeg Padi, Meral, Spital dan Sosial Keunggulan Provinsi	Jumlah Pembelian Beribeg Padi, Meral, Spital dan Sosial Keunggulan Provinsi	55	80	25.000.000,00	80	27.500.000,00	70	30.000.000,00	70	33.000.000,00	70	36.500.000,00
1.06.04.1.02.0007 - Pembelian Beribeg Asuransi Hala Bhai-Hai				100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		155.455.131,22		180.000.000,00
Terdapatnya Pembelian Beribeg Asuransi Hala Bhai-Hai Keunggulan Provinsi	Jumlah Pembelian Beribeg Asuransi Hala Bhai-Hai Keunggulan Provinsi	55	80	100.000.000,00	80	120.000.000,00	70	140.000.000,00	70	155.455.131,22	70	180.000.000,00
1.06.04.1.02.0008 - Jasa ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Jasa ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Jasa ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keunggulan Provinsi	55	80	15.000.000,00	80	18.000.000,00	70	20.000.000,00	70	22.000.000,00	70	25.000.000,00
1.06.04.1.02.0010 - Pembelian Pelayanan Pendidikan Keluarga				30.000.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Keluarga Keunggulan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Keluarga Keunggulan Provinsi	55	80	30.000.000,00	80	36.000.000,00	70	40.000.000,00	70	45.000.000,00	70	50.000.000,00
1.06.04.1.02.0011 - Pembelian Pelayanan Pendidikan Keluarga				30.000.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Keluarga Keunggulan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Keluarga Keunggulan Provinsi	55	80	30.000.000,00	80	36.000.000,00	70	40.000.000,00	70	45.000.000,00	70	50.000.000,00
1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Perumahan				1.400.000.000,00		1.425.000.000,00		1.425.000.000,00		1.425.000.000,00		1.500.000.000,00
Terpenuhi Kebutuhan Perumahan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Keunggulan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Keunggulan Provinsi	55	2000	1.400.000.000,00	2000	1.425.000.000,00	2000	1.425.000.000,00	2000	1.425.000.000,00	2000	1.500.000.000,00
1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sertifikasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlewat di dalam Padi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00

Frekuensi Rehabilitasi Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial bagi Lansia Usia Terendah (Kewenangan Provinsi)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial bagi Lansia Usia Terendah (Kewenangan Provinsi)	K	D	10	11	12.000.000,00	13	14	15	16.000.000,00	17	18.000.000,00	19	20	21.000.000,00	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	149
---	--	---	---	----	----	---------------	----	----	----	---------------	----	---------------	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Terdapatnya Pembinaan Bimbingan Fisk. Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk. Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi	44	50	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0007 - Pembinaan Bimbingan Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
Terdapatnya Pembinaan Bimbingan Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi	44	50	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0010 - Pembinaan Bimbingan Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
Terdapatnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	10	12	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0011 - Pembinaan Bimbingan Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
Terdapatnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	10	10	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0012 - Pembinaan Bimbingan Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
Terdapatnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	8	10	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0015 - Pembinaan Bimbingan Menet. Sosial dan Sosial Kemasyarakatan Provinsi				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
Terdapatnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kemasyarakatan Provinsi	10	10	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
Terdapatnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar/Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar/Kemasyarakatan Provinsi	20	50	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terantar di dalam Part				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
Terdapatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terantar di dalam Part Kemasyarakatan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terantar di dalam Part Kemasyarakatan Provinsi	1	14	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00
1.05.04.1.03.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terantar				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00

Terpilihnya Orang yang Mendapatkan Pembentukan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HKM/DB dan MAPZA yang Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembentukan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HKM/DB dan MAPZA yang Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.04.1.05.0014 - Pembinaan Pelayanan Pendidikan Keluarga									75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terpilihnya orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HKM/DB dan MAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.04.1.05.0015 - Pengembangan dan Kampare Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya													50.000.000,00	
Terlaksananya pengembangan dan Kampare sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan Kampare sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.04.1.05.0017 - Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Konsultasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Usulan Penanggulangan Masalah Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah									75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Usulan Penanggulangan Masalah Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Usulan Penanggulangan Masalah Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									10.500.355.478,38		10.500.355.478,38		10.500.355.478,38	
Meningkatnya jefektifitas dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	10.500.355.478,38	50000	10.500.355.478,38	50000	10.500.355.478,38	10.500.355.478,38
1.06.05.1.01 - Penggalian Awal untuk Tindak Lanjut														
Pencapaian Peningkatan nilai yang diperoleh kebutuhan dasar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Kriteria yang berlaku Kewenangan Provinsi	10	10	10	10	10	10	10	125.000.000,00	25	125.000.000,00	25	125.000.000,00	125.000.000,00
1.06.05.1.01.0001 - Penggalian Awal									125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	

Jumlah RMB															
Terdapatnya Penguasaan Arah dan Tua Anaknya yang Mendapatkan Orang Keturunan yang Berhak Kewenangan Provinsi	E	10	50.000.000,00	15	75.000.000,00	30	85.000.000,00	20	90.000.000,00	25	105.000.000,00				
1.05.05.1.02 - Pengalihan Dana Fakir Miskin Calangan Daerah Provinsi			3.000.000.000,00		3.100.000.000,00		3.200.000.000,00		3.300.000.000,00		3.400.000.000,00				
Pencetakan dokumen yang menunjukkan pengalihan dana fakir miskin	10	14	2.750.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.000.000.000,00				
1.05.05.1.02.0000 - Pengalihan Dana Fakir Miskin Calangan Daerah Provinsi			2.750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00				
Terdapatnya Penguasaan Dana Fakir Miskin Lunas Kabupaten/Kota	10	14	2.750.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.000.000.000,00				
Pencetakan buku/mojo malin dan kelompok peran pemenuhan pendidikan sosial yang menghasilkan dari kerentanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Jumlah Terima Manfaat (RMB) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	100	250	517.000.000,00	250	1.000.000.000,00	250	1.000.000.000,00	250	1.000.000.000,00	250	1.000.000.000,00				
Jumlah Dikirimkan Hasil Koordinasi dan Berkas/Kelembagaan Program Bantuan Sosial Non Tunas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.05.05.1.02.0000 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			517.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00				
Terdapatnya Penerima Manfaat (RMB) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	100	250	517.000.000,00	250	1.000.000.000,00	250	1.000.000.000,00	250	1.000.000.000,00	250	1.000.000.000,00				
1.05.05.1.02.0000 - Fasilitas pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial			0		100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00				
Terdapatnya pengembangan potensi bag pendamping anggotan bantuan sosial	0	0	0	0	100.000.000,00	0	200.000.000,00	0	250.000.000,00	0	300.000.000,00				
1.05.05.1.02.0010 - Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi Program Bantuan Sosial Non Tunas			0		275.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00				
Terdapatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunas	0	0	0	0	275.000.000,00	0	300.000.000,00	0	350.000.000,00	0	400.000.000,00				

Prosedur prosedur standar yang perlu perbaikan daerah	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pratiwi	350	2350	6.228.346.877,00	2450	6.321.336.777,35	2800	8.464.158.512,86	2890	8.733.692.883,87	3000	7.035.000.000,00
1.06.05.1.01.0003 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				6.228.346.877,00		6.321.336.777,35		8.464.158.512,86		8.733.692.883,87		7.035.000.000,00
Terpilihnya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pratiwi	350	2350	6.228.346.877,00	2450	6.321.336.777,35	2800	8.464.158.512,86	2890	8.733.692.883,87	3000	7.035.000.000,00	
1.06.05 - PROGRAM PENGANGKUTAN BENZAM			2.588.000.000,00		2.581.685.386,22	2.721.246.439,19			2.879.404.183,86			
Meningkatnya pelayanan sosial berbasis bencana	109	100	2.588.000.000,00	100	2.581.685.386,22	2.721.246.439,19	100	2.879.404.183,86	100	2.879.404.183,86		1.760.000.000,00
1.06.05.1.01 - Pembiayaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			2.588.000.000,00		2.581.685.386,22	2.721.246.439,19			2.879.404.183,86			
Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan daerahnya	1000	1000	2.588.000.000,00	1000	2.581.685.386,22	2.721.246.439,19	1000	2.879.404.183,86	1000	2.879.404.183,86		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Ekonomi bagi Kelompok Pria dan Wanita Provinsi	100	100	2.588.000.000,00	100	2.581.685.386,22	2.721.246.439,19	100	2.879.404.183,86	100	2.879.404.183,86		
1.06.05.1.01.0004 - Pengembangan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan			194.000.000,00		190.360.390,30	190.360.390,30			194.000.000,00			
1.06.05.1.01.0004 - Pengembangan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan			194.000.000,00		190.360.390,30	190.360.390,30			194.000.000,00			

Terpenuhi biaya yang Mendapatkan Penguatan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewirausahaan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penguatan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewirausahaan Provinsi	100	3200	109.000.000,00	2200	106.300.000,00	2000	100.000.000,00	2000	175.000.000,00	100.000.000,00	3200	104.404.183,86
1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang				175.000.000,00		175.300.000,00		175.300.000,00		175.000.000,00			175.000.000,00
Terpenuhi biaya yang Mendapatkan Penguatan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewirausahaan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengurangan) dan Pasca Bencana Pengungsi dan Masa Tanggap Darurat Kewirausahaan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penguatan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewirausahaan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengurangan) dan Pasca Bencana Pengungsi dan Masa Tanggap Darurat Kewirausahaan Provinsi	1000	1100	175.000.000,00	1100	175.300.000,00	1100	175.000.000,00	1100	175.000.000,00	175.000.000,00	1400	175.000.000,00
1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Pemasangan Pengungsi				239.000.000,00		238.300.000,00		238.300.000,00		239.000.000,00			239.000.000,00
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewirausahaan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewirausahaan Provinsi	200	200	239.000.000,00	210	238.300.000,00	210	239.000.000,00	210	239.000.000,00	239.000.000,00	220	239.000.000,00
Pembelian korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukung Psikososial Kewirausahaan Provinsi	1000	1000	1.450.000.000,00	1000	1.503.900.000,00	1000	1.503.900.000,00	1000	1.503.900.000,00	1.503.900.000,00	1000	1.503.900.000,00
1.06.06.1.01.0005 - Fasilitas Dukung Psikososial				1.450.000.000,00		1.503.900.000,00		1.503.900.000,00		1.503.900.000,00			1.503.900.000,00
Terpenuhi biaya Penguatan Dukung Psikososial bagi Korban Bencana Kewirausahaan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukung Psikososial Kewirausahaan Provinsi	1000	1000	1.450.000.000,00	1000	1.503.900.000,00	1000	1.503.900.000,00	1000	1.503.900.000,00	1.503.900.000,00	1000	1.503.900.000,00
Pembelian material dan layanan yang meningkatkan kemandiriannya	Jumlah orang yang mendapatkan layanan yang meningkatkan kemandiriannya	0	30	220.000.000,00	0	189.685.388,00	30	245.000.000,00	30	245.000.000,00	245.000.000,00	30	245.000.000,00
Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada	0	30		30		0		30			30	
Jumlah orang yang diberikan untuk melakukan pemetaan risiko	Jumlah orang yang diberikan untuk melakukan pemetaan risiko	0	18		1		0		1			4	
Jumlah orang yang mendapatkan penguatan sosial berupa pelatihan, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk penanggulangan bencana pada	Jumlah orang yang mendapatkan penguatan sosial berupa pelatihan, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk penanggulangan bencana pada	0	30		0		0		0			30	
menyertai di lokasi bencana													

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.3 DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR
RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
1.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Mendukung Kegiatan SPM Sosial dan penurunan Kemiskinan
			1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Mendukung Kegiatan SPM Sosial dan penurunan Kemiskinan
			1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Mendukung Kegiatan SPM Sosial dan penurunan Kemiskinan
			1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Mendukung Kegiatan SPM Sosial dan penurunan Kemiskinan Sosial
2.	1.06.06 - PROGRAM PENAGANAN BENCANA	Meningkatnya layanan untuk korban bencana alam dan Sosial	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Mendukung Kegiatan SPM Sosial dan penurunan Kemiskinan
3.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Mendukung Program Lima Retang, Penurunan Kemiskinan dan stunting

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.0.00.0.00.01.00000 - Dinas Sosial									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	57,22	57,25	57,3	57,45	57,5	57,75	
3.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Bab 5

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan harapan hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya. Selain itu, Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha. Secara operasional, Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya. Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

2. Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial pada perannya masing-masing sesuai dengan kaidah serta tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan kedalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya.
3. Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029.